

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Gambaran Umum Daerah	2
1.2.1. Kondisi Geografis Daerah	2
1.2.2. Gambaran Umum Demografi	3
1.2.3. Kondisi Ekonomi	5
1.3. Potensi Unggulan Daerah	8
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	
2.1. Visi dan Misi	10
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	11
2.2.1. Strategi Pembangunan Daerah	11
2.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	12
2.3. Prioritas Pembangunan Daerah	12
2.3.1. Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur	13
2.3.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	14
2.3.3. Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi	14
2.3.4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	15
2.3.5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	16
2.3.6. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	16
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	19
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	20
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan	20
3.1.3. Permasalahan dan Solusi	26
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	27
3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah	27
3.2.2. Target dan Realisasi	28
3.2.3. Permasalahan dan Solusi	29
3.2.4. Rencana dan Realisasi Pembiayaan	30
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
4.1. Urusan Wajib	31
4.1.1. Urusan Pendidikan	31
4.1.2. Urusan Kesehatan	36

4.1.3.	Urusan Pekerjaan Umum	38
4.1.4.	Urusan Perumahan	39
4.1.5.	Urusan Penataan Ruang	41
4.1.6.	Urusan Perencanaan Pembangunan.....	42
4.1.7.	Urusan Perhubungan	43
4.1.8.	Urusan Lingkungan Hidup	44
4.1.9.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	46
4.1.10.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48
4.1.11.	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	50
4.1.12.	Urusan Sosial	50
4.1.13.	Urusan Ketenagakerjaan	51
4.1.14.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	52
4.1.15.	Urusan Penanaman Modal	53
4.1.16.	Urusan Kebudayaan.....	54
4.1.17.	Urusan Pemuda dan Olah Raga.....	55
4.1.18.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	56
4.1.19.	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	57
4.1.20.	Urusan Ketahanan Pangan	61
4.1.21.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	62
4.1.22.	Urusan Kearsipan.....	63
4.1.23.	Urusan Informasi dan Komunikasi	63
4.1.24.	Urusan Perpustakaan.....	64
4.2.	Urusan Pilihan yang Dilaksanakan	65
4.2.1.	Urusan Pertanian.....	65
4.2.2.	Urusan Kehutanan.....	67
4.2.3.	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	68
4.2.4.	Urusan Pariwisata	69
4.2.5.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	70
4.2.6.	Urusan Perdagangan	71
4.2.7.	Urusan Perindustrian.....	72
BAB V	PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	
BAB VI	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	
6.1.	Kerjasama antar Daerah	77
6.1.1.	Kebijakan dan Kegiatan.....	77
6.1.2.	Kegiatan Pertemuan APEKSI	77
6.1.3.	Kegiatan Pertemuan AKKOPSI	78
6.2.	Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	79
6.3.	Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah	84
6.4.	Pembinaan Batas Wilayah	85
6.5.	Penanganan Bencana.....	86
6.6.	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	87
6.6.1.	Gangguan Yang Terjadi	87

6.6.2. SKPD Yang Terlibat Dalam Penanganan Ketertiban dan Ketertiban Umum	88
6.6.3. Pengulangan dan Kendala	88
6.6.4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dan Pengulangan	89

BAB VII PENUTUP